

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Umbu Kawolu telah berjalan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Perencanaan dilakukan secara partisipatif melalui Musdus dan Musdes, pelaksanaan pembangunan berfokus pada infrastruktur dan pemberdayaan, penatausahaan dilakukan tertib oleh Kaur Keuangan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dilaksanakan secara transparan kepada pemerintah dan masyarakat.

Dana Desa memberikan dampak positif berupa peningkatan infrastruktur fisik seperti jalan tani, listrik, dan air bersih, serta turut mendorong kesejahteraan masyarakat melalui akses layanan dasar dan peningkatan pendapatan. Namun, masih terdapat tantangan dalam pemerataan pembangunan dan kemandirian masyarakat yang perlu menjadi perhatian ke depan.

1.2 Implikasi Teoritis

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori pengelolaan kebijakan publik dan keuangan desa sebagaimana dikemukakan oleh Rossi dan Freeman (2011) dalam teori dampak kebijakan, yang menekankan pentingnya pengukuran efektivitas program melalui evaluasi perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah implementasi suatu kebijakan.

Dalam konteks penelitian ini, pengelolaan Dana Desa di Desa Umbu Kawolu menunjukkan hasil positif terhadap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan partisipatif, pelaksanaan pembangunan berbasis kebutuhan, serta transparansi dalam pelaporan menjadi bukti konkret bahwa Dana Desa telah memberikan dampak langsung pada kehidupan masyarakat desa. Hal ini mendukung kerangka teori Rossi dan Freeman bahwa kebijakan yang tepat sasaran akan menghasilkan perubahan nyata secara sosial dan ekonomi.

Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya oleh Rafsan Jani, Khumaira, dan Icha Shintia, yang menyatakan bahwa pengelolaan Dana Desa yang baik mampu mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup warga desa. Namun, tantangan seperti keterlambatan pencairan dan keterbatasan sumber daya manusia tetap menjadi hambatan yang perlu dibenahi.

Secara akademik, temuan penelitian ini memperluas pemahaman terhadap teori kebijakan publik dan tata kelola keuangan desa, serta menegaskan pentingnya pendekatan partisipatif dan transparansi sebagai prinsip utama dalam pengelolaan dana publik. Hasil ini juga memperkuat relevansi model pembangunan partisipatif dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pembangunan berbasis kebutuhan lokal.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah desa dan lembaga terkait untuk terus memperbaiki mekanisme pengelolaan Dana Desa agar lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga dapat menjadi pijakan untuk studi lanjutan dalam mengembangkan indikator keberhasilan pembangunan desa berbasis data partisipatif dan evaluasi dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat.

1.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Umbu Kawolu, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan untuk berbagai pihak terkait. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Umbu Kawolu, diharapkan untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar hasil pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Selain itu, pencatatan dan pelaporan keuangan hendaknya dilakukan

secara lebih tertib dan transparan agar akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa semakin meningkat.

2. Bagi Aparat Pengelola Keuangan Desa, khususnya Kaur Keuangan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), disarankan untuk terus mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah agar pemahaman mengenai regulasi pengelolaan keuangan desa semakin baik, serta mampu menyusun laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat.
3. Bagi Masyarakat Desa Umbu Kawolu, diharapkan agar terus aktif memberikan masukan serta terlibat dalam musyawarah pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, tetapi juga memastikan bahwa alokasi Dana Desa benar-benar menysasar kebutuhan prioritas warga.
4. Bagi Pemerintah Daerah dan Pendamping Desa, perlu untuk meningkatkan intensitas pengawasan serta pendampingan teknis dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, terutama dalam hal verifikasi dokumen dan kelayakan kegiatan agar tidak terjadi kesalahan administratif atau pelanggaran hukum.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dan dasar kajian untuk memperluas topik-topik lain yang relevan, seperti pengaruh Dana Desa terhadap pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan kelembagaan desa, atau efektivitas pelaksanaan pembangunan berbasis data digital di era desa cerdas (smart village).